

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-kota, menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup mengembirakan, namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.<sup>1</sup>

Berdasarkan masalah ini, maka berbagai pihak mempertanyakan apa yang salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita?. Dari berbagai pengamatan dan analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak mengalami peningkatan secara merata.<sup>2</sup>

*Faktor pertama*, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional menggunakan pendekatan education function atau *input-output* analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi semua *input* (masukan) yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut, maka lembaga ini akan menghasilkan *output* yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa apabila *input* seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran, dan perbaikan sarana serta prasarana pendidikan lainnya,

---

<sup>1</sup> Ricky Ekaputra Foeh, "MPMBS", <http://pakguruonline.pendidikan.net/mpmbs1.html>, akses: 07/04/2010.

<sup>2</sup> Akbariz Rahmad, "Rendahnya Mutu Pendidikan Kita", <http://akbarizrahmads.blogspot.com/2010/03/rendahnya-kualitas-pendidikan-di.html?>, akses: 07/04/2010.

dipenuhi, maka mutu pendidikan (*output*) secara otomatis akan terjadi. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak terjadi. Mengapa? Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan *educational production function* terlalu memusatkan pada *input* pendidikan dan kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan sangat menentukan *output* pendidikan.

*Faktor kedua*, penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratik-sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggaraan pendidikan sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi birokrasi di atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreativitas/inisiatif untuk mengembangkan dan memajukan lembaganya termasuk peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.

*Faktor ketiga*, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. Partisipasi guru dalam pengambilan keputusan sering diabaikan, pada hal terjadi atau tidaknya perubahan di sekolah sangat tergantung pada guru. Dikenalkan pembaruan apapun jika guru tidak berubah, maka tidak akan terjadi perubahan di sekolah tersebut. Partisipasi masyarakat selama ini pada umumnya sebatas pada dukungan dana, sedang dukungan-dukungan lain seperti pemikiran, moral dan barang/jasa kurang diperhatikan. Akuntabilitas sekolah terhadap masyarakat juga lemah. Sekolah tidak mempunyai beban untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pendidikan kepada masyarakat, khususnya orang tua siswa, sebagai salah satu unsur utama yang berkepentingan dengan pendidikan (*stakeholder*).

Berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut diatas, tentu saja perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan

reorientasi penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari manajemen peningkatan mutu berbasis pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.

Secara umum, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan *otonomi* lebih besar kepada sekolah, dan mendorong *partisipasi* secara langsung warga sekolah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan) dan masyarakat (orang tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha, dsb.) untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup>

Salah satu wujud aktualisasi pelaksanaan MPMBS adalah dibentuknya suatu badan yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan.<sup>4</sup>

Berdasarkan keputusan Mendiknas tersebut, Komite Sekolah merupakan sebuah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di aturan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Untuk penamaan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing satuan pendidikan, seperti Komite Sekolah, majlis madrasah, majlis sekolah, komite TK, atau nama-nama lain yang disepakati bersama.<sup>5</sup>

Adapun tujuan dibentuknya Komite Sekolah yaitu (1) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan; (2) meningkatkan

---

<sup>3</sup> Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet.II, hlm. 86.

<sup>4</sup> Suparlan, *Membangun Sekolah Efektif*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), cet.I, hlm. 205.

<sup>5</sup> [http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok\\_16.pdf](http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok_16.pdf), "Lampiran Kepmendiknas nomor: 044/U/2002", Akses: 01/03/2010.

tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (3) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.<sup>6</sup>

Hal ini berarti peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam peningkatan mutu pendidikan, bukan hanya sekadar memberikan bantuan berwujud material saja, namun juga diperlukan bantuan yang berupa pemikiran, ide, dan gagasan-gagasan inovatif demi kemajuan suatu sekolah. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan ini dirasa sangat diperlukan, dan sekarang diharapkan tidak hanya dalam bentuk konsep dan wacana, tetapi lebih pada *action* di lapangan. Selama ini dalam realitasnya pelibatan masyarakat dalam pendidikan lebih pada tataran konsep, wacana, atau slogan. Masih jauh dari apa yang diharapkan.<sup>7</sup>

Belajar dari berbagai pengalaman dan juga kenyataan-kenyataan di lapangan, ternyata mengimplementasikan konsep Komite Sekolah tidak mudah. Kesulitannya bukan bersumber pada tataran konsep yang kurang jelas, melainkan lebih-lebih oleh karena budaya berorganisasi di kalangan masyarakat belum berkembang, apalagi organisasi untuk mengurus lembaga pendidikan yang bersifat non profit ini. Sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Mendiknas tentang Komite Sekolah itu telah dilakukan kegiatan sosialisasi maupun penyusunan berbagai pedoman operasional pelaksanaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, organisasi semacam itu, yang benar-benar berhasil mampu melakukan peran dan fungsinya secara baik, jumlahnya amat kecil. Sudah menjadi sesuatu yang lazim, bahwa lembaga atau badan yang dibentuk oleh atau atas anjuran pemerintah pada kenyataannya hanya berjalan sebatas tataran formal belaka.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Nana Syaodih Sukmadinata dkk. *Pengendalian mutu pendidikan sekolah menengah (konsep, Prinsip, dan instrument)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), Ce.II, hlm.7.

<sup>8</sup> Sri Renani Pantjastuti dkk., *Komite Sekolah: Sejarah dan Prospeknya di Masa Depan*, (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), cet. I, hlm. 84.

Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsinya, Komite Sekolah harus menyusun program kerja atau sebuah perencanaan program atau dalam hal ini Komite Sekolah membutuhkan pengelolaan yang baik agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan yang telah direncanakan sebelumnya. Pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu cara untuk mengatur sebuah program, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Komite Sekolah agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Melihat berbagai kenyataan di atas bahwa tidak sedikit Komite Sekolah yang belum dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, maka dalam hal ini peneliti akan meneliti sebuah lembaga yang telah mampu mengefektifkan Komite Sekolah sebagai badan mandiri yang membantu satuan pendidikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Salah satu contoh lembaga pendidikan yang telah mampu membentuk Komite Sekolah dengan mengefektifkan peran dan fungsinya adalah SD Islam Al Azhar 29 Semarang yang terletak di jalan RM Hadisoebeno Sosrowardoyo Km. 6 Boja. SD Islam Al Azhar 29 Semarang berdiri atas prakarsa Bapak H. Imam Syafi'i, SE.,MM. yang berinisiatif untuk membantu pemerintah dengan menyelenggarakan sistem pendidikan terpadu sebagai bentuk kepedulian dan kontribusinya terhadap bangsa. Inisiatif tersebut diwujudkan dengan menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dengan memberdayakan partisipasi masyarakat, sehingga SDM yang dihasilkan menjadi manusia beriman, berkualitas, mumpuni, dan siap membangun bangsa Indonesia.

Komite Sekolah di SD Islam al Azhar 29 Semarang sangat berperan terhadap peningkatan mutu pendidikan di lembaga ini. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan Komite Sekolah di setiap pelaksanaan program kerja sekolah. Komite Sekolah selalu memberikan dukungan baik yang berupa tenaga, pemikiran maupun material. Komite Sekolah di SD Islam Al Azhar 29 Semarang telah dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik,

karena Komite Sekolah di Lembaga ini dalam pembentukannya telah melalui proses dengan menggunakan prinsip Transparan, Akuntabel dan Demokratis. Selain itu Komite Sekolah mempunyai program kerja yang jelas untuk membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa masih adanya Komite Sekolah di beberapa lembaga yang belum mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, tetapi mengapa Komite Sekolah di SD Islam Al Azhar 29 Semarang telah mampu melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang pengelolaan yang dilakukan oleh Komite Sekolah mulai dari penyusunan program, pelaksanaan program dan evaluasi program, sehingga dapat dinyatakan berperan dengan baik. Sejauh mana upaya komite membantu meningkatkan mutu pendidikan, dan faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

## **B. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan memberikan penegasan beberapa istilah terkait dengan judul skripsi yang berjudul “Pengelolaan Komite Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.”

### **1. Pengelolaan Komite Sekolah**

Pengelolaan merupakan kata lain dari manajemen. Manajemen berasal dari bahasa Inggris *manage* yang memiliki arti mengatur, mengurus, melaksanakan, mengelola.<sup>10</sup>

Sedangkan Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu,

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Siti Fadillah, S.Ag (Waka kurikulum SDIA 29 Semarang), tanggal 01 April 2010.

<sup>10</sup> John M. Echols dan Hasan Shadaly, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 372.

pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan di luar sekolah.<sup>11</sup>

Jadi pengelolaan Komite Sekolah merupakan suatu proses yang dilakukan oleh Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan program.

## 2. Meningkatkan

Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf, dsb), Mempertinggi; memperhebat; (produksi, dsb), mengangkat diri.<sup>12</sup> Dalam hal ini adalah meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan.

## 3. Mutu Pendidikan

Kata Mutu berasal dari Bahasa Inggris "*quality*" yang berarti kualitas.<sup>13</sup> Secara umum, mutu diartikan sebuah proses terstruktur untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan.<sup>14</sup>

Sedangkan, pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas manusia.<sup>15</sup> Jadi, mutu pendidikan adalah usaha sadar dan bertujuan untuk mengembangkan kualitas pendidikan. Sedangkan mutu di bidang pendidikan meliputi mutu *input*, proses, *output*, dan *outcome*.

## C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah dan penegasan istilah seperti yang dikemukakan di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

---

<sup>11</sup> [http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok\\_16.pdf](http://www.mandikdasmen.depdiknas.go.id/docs/dok_16.pdf), "Kepmendiknas nomor: 044/U/2002", Akses: 01/03/2010.

<sup>12</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, , *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet.3, hlm.1060

<sup>13</sup>John M. Echols dan Hasan Shadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1976, hlm. 327.

<sup>14</sup>Jerome S. Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan*, terj. Yosol Irinatara, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 75.

<sup>15</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi FF.duskatif*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 22.

1. Bagaimana pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah disusun di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya wacana keilmuan khususnya kajian pendidikan dalam bidang Kependidikan Islam (KI) dan juga menambah bahan pustaka bagi Fakultas Tarbiyah.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa dijadikan bahan koreksi bagi Komite Sekolah dalam usahanya meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam al azhar 29 Semarang. Apakah sudah maksimal, atau harus masih perlu peningkatan lagi. Selain itu Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi lembaga-lembaga lain, agar lebih mengoptimalkan peran Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikannya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Penelitian yang akan diangkat mengenai pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan masih tergolong sedikit diangkat di fakultas tarbiyah, khususnya di jurusan Kependidikan Islam. Tetapi ada beberapa karya peneliti yang telah lalu dapat dijadikan sebagai

bahan kajian pustaka. Kajian pustaka terhadap karya-karya terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan guna membantu pembahasan penelitian di lapangan nanti. Beberapa karya yang dimaksud antara lain :

1. M. Subkhan Noer (2009), Skripsi dengan judul “*Partisipasi Komite Sekolah terhadap Pengembangan Madrasah, (Studi Kasus di MAN Kendal)*”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa peran Komite Sekolah dalam mewujudkan pengembangan MAN Kendal adalah dengan membentuk Komite Sekolah yang terdiri dari beberapa unsure yang sangat urgen dalam pengembangan madrasah seperti pendidik, wiraswasta, birokrasi, kontraktor, dan masyarakat sekolah. Selain komite menjadi jembatan antara pihak madrasah dan masyarakat sekitar sekolah dalam rangka mewujudkan program pengembangan sekolah yang dilakukan dengan sistem kekeluargaan.<sup>16</sup>
2. Istik Lailiyah (2007), Skripsi berjudul “*Peran Komite Sekolah Bagi Kehidupan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tawaran Kec.Kenduruan Kab.Tuban*”. dalam skripsi ini dijelaskan bahwa peran Komite Sekolah yaitu sebagai pendukung, sebagai penghubung, sedangkan untuk peran Komite Sekolah sebagai pemberi pertimbangan dan pengontrol belum terlaksana.<sup>17</sup>

Terdapat perbedaan antara skripsi yang akan peneliti tulis dengan skripsi-skripsi diatas. Skripsi-skripsi di atas hanya membahas tentang peran dan fungsi Komite Sekolah bagi kehidupan maupun pengembangan satuan pendidikan. Sedangkan Skripsi yang akan peneliti tulis membahas tentang pengelolaan atau manajemen Komite Sekolah untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi secara optimal agar tujuan dibentuknya Komite Sekolah dapat tercapai yaitu membantu Satuan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan.

---

<sup>16</sup> M. Subkhan Noer, “Partisipasi Komite Sekolah terhadap Pengembangan Madrasah, (Studi Kasus di MAN Kendal)”, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2009), hlm. 67, t.d.

<sup>17</sup> Istik Lailiyah, “Peran Komite Sekolah Bagi Kehidupan Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah Tawaran Kec.Kenduruan Kab.Tuban”, Skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2007), hlm.71, t.d.

## F. Metode Penelitian

### 1. Fokus Penelitian

Untuk mempertajam penelitian, maka peneliti akan menetapkan fokus. Dalam menetapkan fokus ada empat alternatif yang dapat digunakan yaitu a) menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan informan; b) menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; c) menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; d) menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada.<sup>18</sup>

Pada penelitian ini akan di fokuskan pada pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

### 2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dapat dipandang sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>19</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>20</sup> Adapun tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor pendukung dan penghambat

---

<sup>18</sup> Sugiono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 234.

<sup>19</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 6.

<sup>20</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

#### a. Interview atau Wawancara

Metode interview atau wawancara yaitu alat pengumpul data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>21</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang bagaimana pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang. Dalam hal ini, penulis mengadakan wawancara langsung dengan ketua Komite Sekolah, waka Komite Sekolah, Sekretaris Komite sekolah, Kepala Sekolah, dan wakasi kurikulum SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

#### b. Observasi atau Pengamatan

Observasi adalah metode yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan mengenai pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al-Azhar 29 Semarang.

Pengamatan ini penulis anggap suatu metode yang sangat membantu karena disamping bisa secara langsung mengetahui permasalahan secara akurat juga sangat membantu dalam

---

<sup>21</sup> Suharsi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 202.

<sup>22</sup>S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), Cet.II, hlm.. 158.

memberikan suatu analisis terhadap permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang.

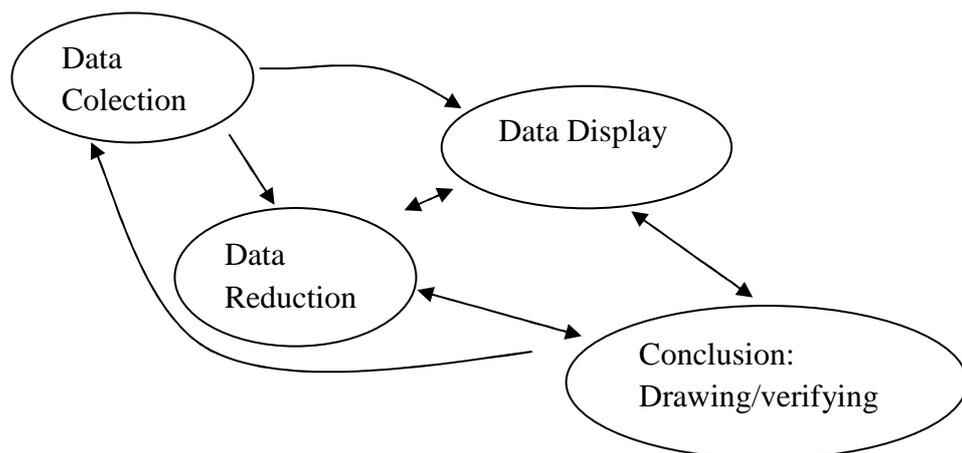
c. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan dengan mencari data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.<sup>23</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan untuk membantu menganalisis data-data primer.

4. Metode Analisis data

a. Analisis data interaksi

Analisis data yang digunakan adalah model analisis data interaksi, dalam hal ini komponen data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, tiga komponen analisis (reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan) berinteraksi.<sup>24</sup>



Gambar. Komponen dalam analisis data (*Interactive model*)<sup>25</sup>

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

<sup>24</sup> Sugiono, *op.cit.*, hlm. 337.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 277.

Data yang diperoleh dari penelitian atau data collection yang masih bersifat kompleks dan rumit direduksi, yaitu merangkum dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang hal-hal yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini yang harus direduksi meliputi data hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang berisi tentang pengelolaan Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SD Islam Al Azhar 29 Semarang yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta evaluasi program-program.

Data hasil reduksi disajikan atau di display ke dalam bentuk yang mudah dipahami, biasanya penyajian ini dalam bentuk, naratif, table, grafik, pictogram. Kesimpulan dan verifikasi, kesimpulan awal yang dikemukakan dalam analisis interaktif masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.

#### b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.<sup>26</sup> Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan dibedakan menjadi 4 macam yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>27</sup>

- 1) Triangulasi dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.

---

<sup>26</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Colombus, Cio USA, 1988), hlm. 330.

<sup>27</sup>Lexy J. Moleong, *Ibid*, hlm.330-332.

- 2) Triangulasi dengan metode, yaitu metode pengecekan data dengan menggunakan strategi pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
- 3) Triangulasi dengan penyidik, yaitu dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.
- 4) Triangulasi dengan teori, yaitu teknik berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori saja. Dalam hal ini, jika analisis telah menguraikan pola, hubungan dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis maka penting sekali untuk mencari tema atau penjelasan pembanding atau penyaing.